



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASROKHAN

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2018

PIHAK KEDUA,

Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

MASROKHAN
NIP 195910121990091001

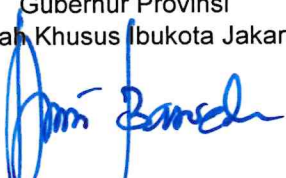
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS SOSIAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	16,4% PMKS (7000WBS+14520 Lansia)
		Persentase lokasi strategis di wilayah provinsi DKI Jakarta yang bersih dari PMKS Jalanan	89% (284 Titik dari 318 Titik proyeksi ditahun 2022)
		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2744 Orang
		Presentase sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan	51% (28 lokasi layak dari 46 lokasi gedung panti + 59 SKKT layak dari 124 SKKT)
2	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	100%
3	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri	890 KPM
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%
		Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%
		Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu.	100%
		Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD	100%
		Jumlah updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	19 dataset

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Rehabilitasi Sosial	197.105.211.063	Alokasi anggaran APBD pada Dinas Sosial, Sudin Sosial 5 Wilayah dan Panti - Panti Sosial
2	Program Perlindungan Sosial	17.570.182.542	Alokasi anggaran APBD pada Dinas Sosial dan Sudin Sosial 5 Wilayah
3	Program Pemberdayaan Sosial	3.425.745.000	Alokasi anggaran APBD pada Dinas Sosial dan Sudin Sosial 5 Wilayah
4	Program Penanganan Fakir Miskin	7.175.478.522	Alokasi anggaran APBD pada Dinas Sosial dan Sudin Sosial 5 Wilayah
5	Program Peningkatan Layanan Prasarana dan Sarana Kesos	74.621.514.972	Alokasi anggaran APBD pada Dinas Sosial, Sudin Sosial 5 Wilayah, Panti - Panti Sosial, PPPIJ dan PMR

Jakarta, 19 Januari 2018

Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Anies Baswedan, Ph.D

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta



Mastrokhan
NIP. 195910121990091001

No.	Indikator Kinerja (KPI)	Sumber Data	Penjelasan Indikator Kinerja (Cara Menghitung)	TAHUN 2018												
				Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des *)
6	Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri	BDT	merujuk pada kaprensos 146/HUK/2013 kategori mandiri untuk keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan sosial dikembangkan menjadi: 1. mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa makan 3 x sehari dan membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga 2. mampu menyekolahkan anak hingga SLTA 3. mempunyai tempat yang layak, memiliki akses air bersih dan listrik yang memadai 4. penghasilan dari Bantuan Usaha Ekonomi Produktif memiliki keuntungan bersih perbulan minimum standar UMK tahun berjalan atau penghasilan diatas garis kemiskinan tahun berjalan per kapita dikalikan jumlah anggota keluarga (yang lebih rendah) atau termasuk kategori UEP Maju pada perhitungan program ini menggunakan satuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).	Target (t)	840 KPM	840 KPM	840 KPM	850 KPM	850 KPM	850 KPM	860 KPM	860 KPM	870 KPM	880KPM	890 KPM	0
7	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektoral	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2017 dan 2018 yang telah diselesaikan oleh SKPD dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima Tahun 2017 dan 2018 dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektoral)	Target (t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	Bappeda	1. Realisasi fisik kegiatan (50%) 2. Realisasi keuangan (50%) Rata-rata penjumlahan target SKPD dan UKPD dibawah organisasinya (Verifikasi oleh Bappeda)	Target (t)	5,64%	13,55%	24,80%	31,96%	39,17%	49,84%	57,71%	64,25%	72,22%	76,92%	81,67%	100%
9	Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Bulanan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD dan UKPD di bawah koordinasinya sesuai dengan SAP secara tepat waktu. (Verifikasi oleh BPKD)	Target (t)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD	Badan Pengelola Aset Daerah	1. Inventarisasi aset (mencetak daftar barang berdasarkan KIB 2017 di dalam Sistem Informasi Aset) 2. Input hasil inventarisasi dan pencacahan data aset dalam Sistem Informasi Aset 3. Identifikasi/ penempelan identitas aset (Barcoding) 4. Melakukan pelaporan (penginputan dan pelaporan) (sesuai posisi aset pada KIB Tahun 2017). (Verifikasi oleh BPAD)	Target (t)	0%	0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	100%
11	Jumlah updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	Diskominfotik	Jumlah data strategis OPD yang diupdate pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi (Verifikasi oleh Diskominfotik)	Target (t)	16	4	4	4	4	5	6	4	4	4	4	6

Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Anies Baswedan, Ph.D

Jakarta, 19 Januari 2018

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta


Drs. Masrokhah, M.Si
NIP. 196910121990091001